

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN SURVEI
INDEKS PERSEPSI KORUPSI SEMESTER I
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmatnya sehingga laporan Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Semester I tahun 2020 dapat diselesaikan.

Survey Indeks Persepsi Korupsi ini merupakan gambaran atas Indeks Persepsi Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi yang dapat diartikan bahwa Persepsi Korupsi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan bisa dijelaskan/diukur berdasarkan tindakan koruptif yang diterima masyarakat terhadap layanan yang diberikan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei ini merupakan upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam rangka meminimalisir tindakan koruptif aparatur Pengadilan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kami juga menyadari jika pelaksanaan survei dan laporan survei ini tentu masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan. Kritik dan saran yang membangun dari khalayak senantiasa kami terima untuk semakin bainya. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Pekanbaru, Juli 2020
Ketua,

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 195609171979022002

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II METODOLOGI.....	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	5
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	5
BAB III INDEKS KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK.....	8
3.1. Responden.....	8
3.2. Indeks Persepsi Korupsi per indikator	10
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	20
BAB IV PENUTUP	22
4.1. Kesimpulan	22
4.2. Rekomendasi	22

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>	<i>Hal</i>
1. Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas	6
2. Ruang Lingkup Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	7
3. Nilai Persepsi.....	7
4. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	9
5. Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan	11
6. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh.....	12
7. Indeks Pada Indikator Pada Transaksi Biaya	13
8. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan.....	14
9. Indeks Pada Indikator Hadiah	15
10. Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya	16
11. Indeks Pada Indikator Percaloan	17
12. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang	18
13. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia.....	19
14. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik PTUN Pekanbaru.....	20
15. Indeks Persepsi Korupsi PTUN Pekanbaru	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan menekan tindakan koruptif.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan satuan kerja di bawah mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang melaksanakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki peran dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai satuan kerja yang ingin mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam lingkungan kerjanya, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah Bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

1.3 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu Semester I Tahun 2020

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

2.4 Teknik Pengumpulan Data Dan QualityControl

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpawawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu dua bulan adapun data yang terkumpul sebanyak 75(Tujuh puluh lima) responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru). Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan surveilPK.

2.5 Teknik AnalisisData

Analisisdata untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 6. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 6 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring /angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Kepuasan Pelayanan Publik masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisisperhitunganIndeks Kepuasan Pelayanan Publik pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 –6 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala Indeks Kepuasan Pelayanan Publik antara 1 – 6 yang artinya mendekati

nilai 6 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.83	16.67-30.56	1	Sangat tidak bersih dari korupsi
2	1.84 – 2.66	30.56–44.44	2	Tidak bersih dari korupsi
3	2.67 – 3.50	44.45 – 58.33	3	Kurang bersih dari korupsi
4	3.51 – 4.33	58.33 – 72.22	4	Cukup bersih dari korupsi
5.	4.34 – 5.17	72.22 – 86.11	5	Bersih dari korupsi
6.	5.18 – 6.00	86.11 – 100.00	6	Sangat bersih dari Korupsi

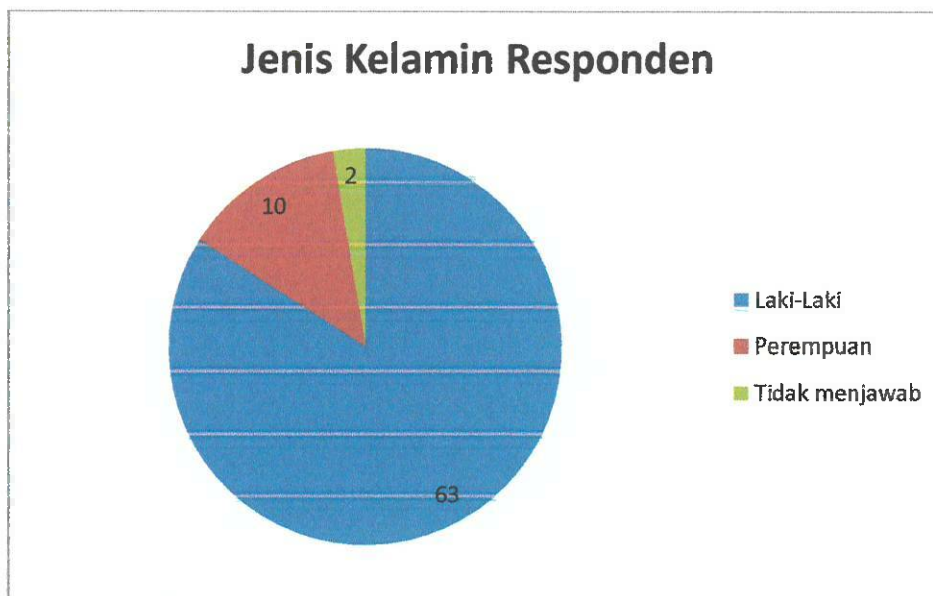
BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Responden

Survey Indeks persepsi Korupsi ini mulai dilaksanakan pada Periode Semester I tahun 2020. Pada periode Semester I Tahun 2020 jumlah Responden yang mengikuti Survey Indeks Persepsi Korupsi berjumlah 75 (tujuh puluh lima) Orang. Adapun Responden Survey Indeks Persepsi Korupsi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Anggota Polri, Advokat/Pengacara, Masyarakat, dan Mahasiswa. Dengan rentang Usia mulai dari 20 tahun – 73 tahun.

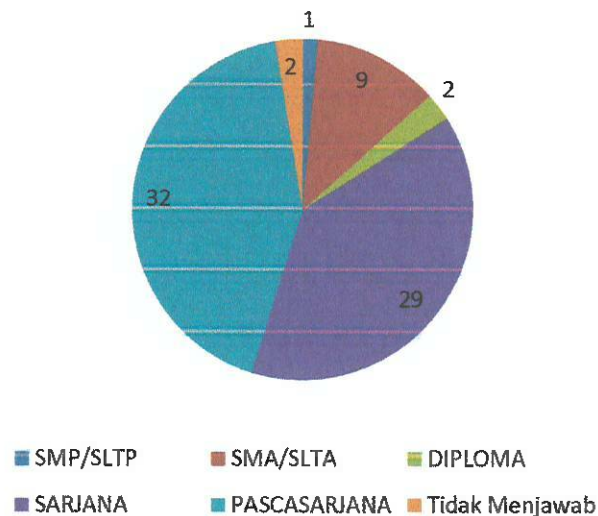
Adapun Responden menurut Jenis Kelamin Laki-laki sebanyak 63 orang (84,0 %) dan Perempuan sebanyak 10 orang (13,3 %) sedangkan 2 orang (2,7 %) tidak mengisi data.



Adapun Responden diklasifikasikan menurut Pendidikan sebagai berikut:

1. SMP/SLTP sebanyak 1 orang (1.3 %)
2. SMA/SLTA sebanyak 9 orang (12.0 %)
3. Diploma (D1/D2/D3/D4) sebanyak 2 orang (2.7 %)
4. Sarjana (S1) sebanyak 29 orang (38.7 %)
5. Pasca Sarjana (S2) sebanyak 32 orang (42.7 %)
6. Tidak memberi informasi sebanyak 2 orang (2.6 %)

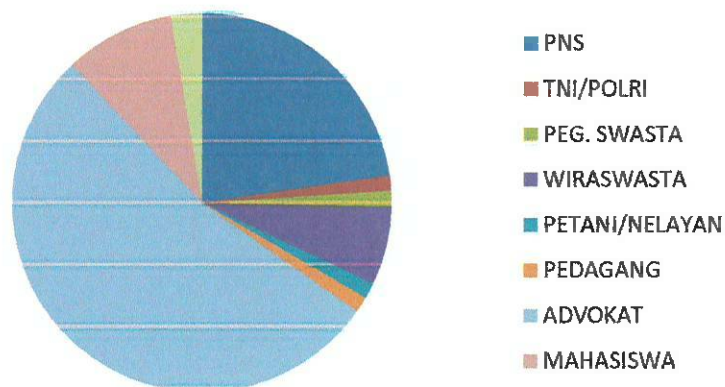
Tingkat Pendidikan Responden



Adapun diklaifikasikan menurut Pekerjaan sebagai berikut :

1. PNS sebanyak 17 orang (22.7 %)
2. TNI/POLRI sebanyak 1 orang (1.3 %)
3. Pegawai Swasta sebanyak 1 orang (1.3 %)
4. Wiraswasta sebanyak 5 orang (6.7 %)
5. Petani/Nelayan sebanyak 1 orang (1.3 %)
6. Pedagang sebanyak 1 orang (1.3 %)
7. Advokat sebanyak 40 orang (53.3 %)
8. Lainnya Mahasiswa sebanyak 7 orang (9.3 %)
9. Sebanyak 2 orang tidak memberikan informasi (2.8 %)

Pekerjaan Responden



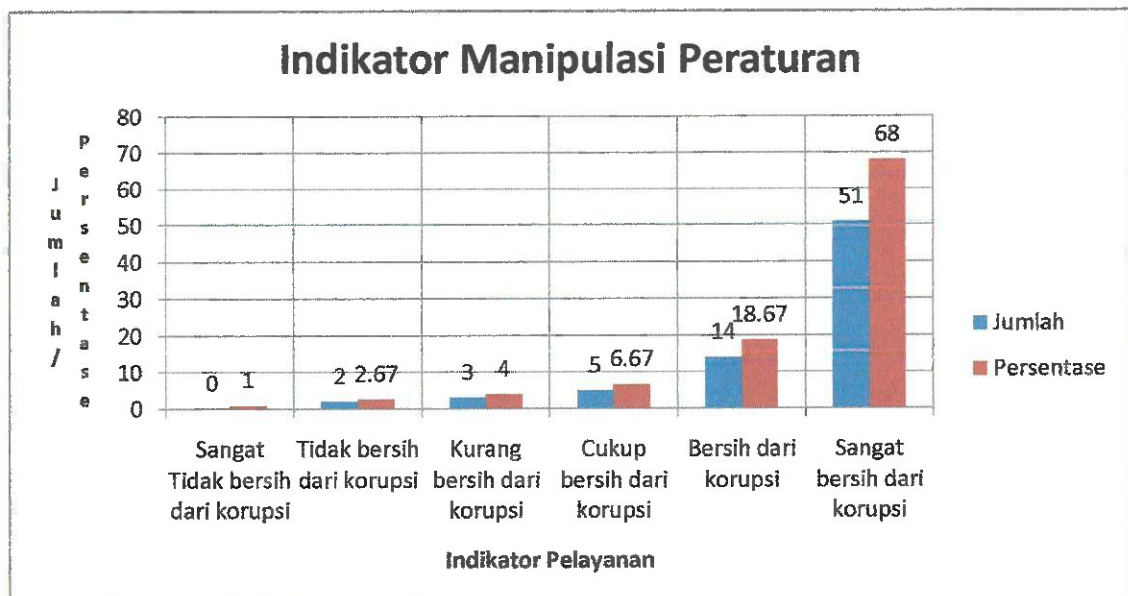
3.2. Indeks Persepsi Korupsi

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator manipulasi Peraturan menunjukkan hasil pada interval index 5.45. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersih dari korupsi.

Tabel 4.
Indeks Indikator Manipulasi Peraturan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1.	1.00-1.83	Sangat tidak bersih dari korupsi	0	0	0	5.45
2.	1.84-2.66	Tidak bersih dari korupsi	2	4	2.67	
3.	2.67-3.50	Kurang bersih dari korupsi	3	9	4.00	
4.	3.51-4.33	Cukup bersih dari korupsi	5	20	6.67	
5.	4.44 - 5.17	Bersih dari korupsi	14	70	18.67	
6.	5.17 – 6.00	Sangat bersih dari korupsi	51	306	68.00	
Jumlah			75	409	100%	



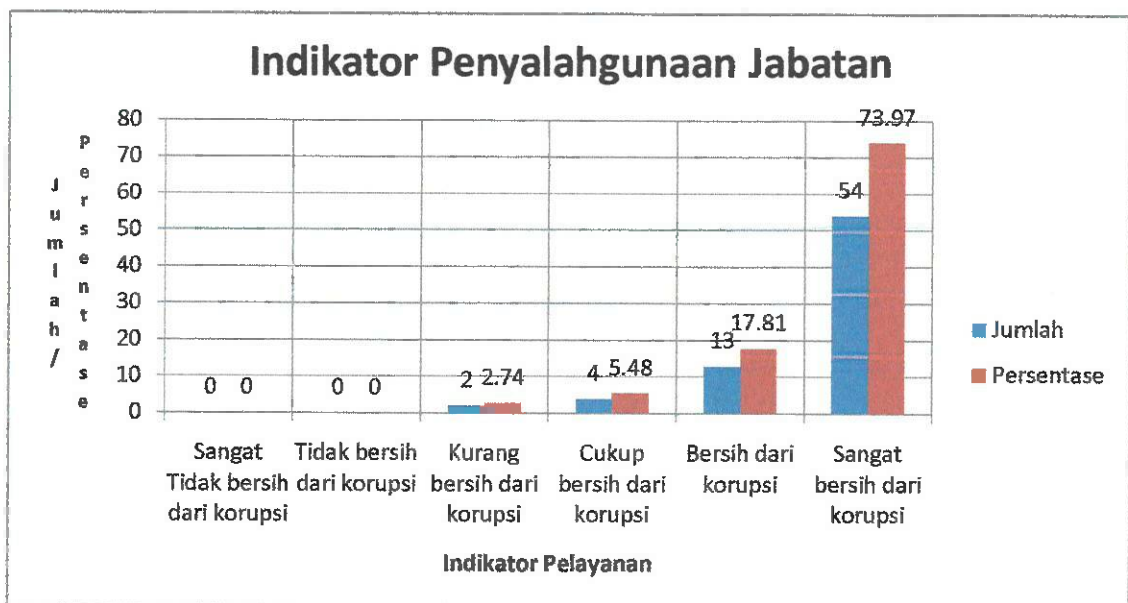
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan menunjukkan hasil pada index 5.63.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersih dari korupsi.

Tabel 5.
Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1.	1.00-1.83	Sangat tidak bersih dari korupsi	0	0	0	5.63
2.	1.84-2.66	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	
3.	2.67-3.50	Kurang bersih dari korupsi	2	6	2.74	
4.	3.51-4.33	Cukup bersih dari korupsi	4	16	5.48	
5.	4.44 - 5.17	Bersih dari korupsi	13	65	17.81	
6.	5.17 – 6.00	Sangat bersih dari korupsi	54	324	73.97	
Jumlah			73	411	100%	



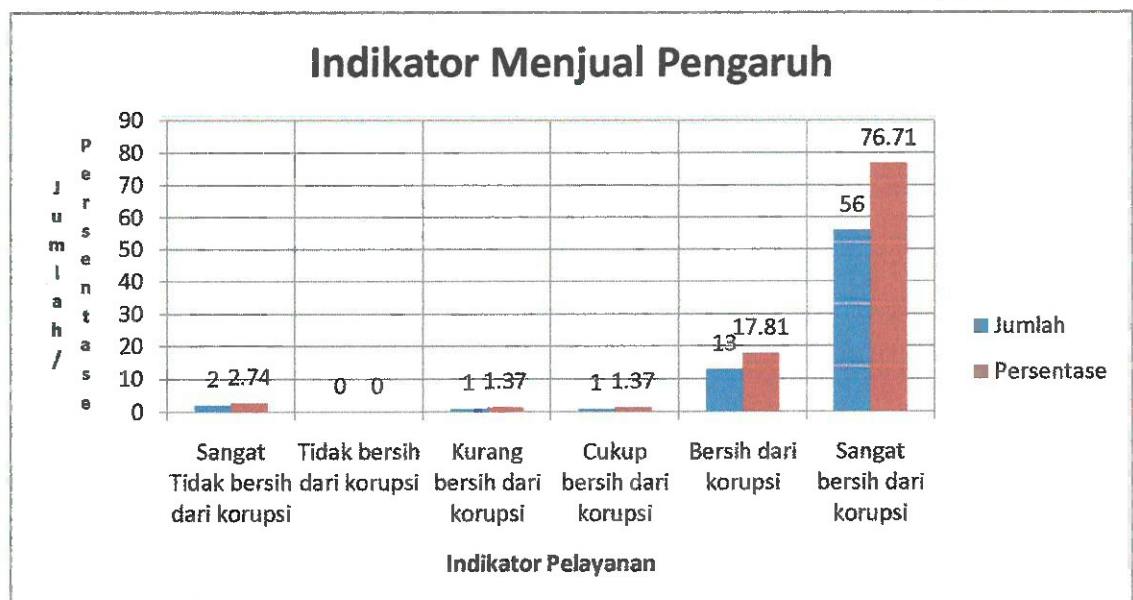
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh menunjukkan hasil pada index 5.62.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersih dari korupsi.

Tabel 6.
Indeks indikator Menjual Pengaruh

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1.	1.00-1.83	Sangat tidak bersih dari korupsi	2	2	2.74	5.62
2.	1.84-2.66	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	
3.	2.67-3.50	Kurang bersih dari korupsi	1	3	1.37	
4.	3.51-4.33	Cukup bersih dari korupsi	1	4	1.37	
5.	4.44 - 5.17	Bersih dari korupsi	13	65	17.81	
6.	5.17 – 6.00	Sangat bersih dari korupsi	56	336	76.71	
Jumlah			73	410	100%	



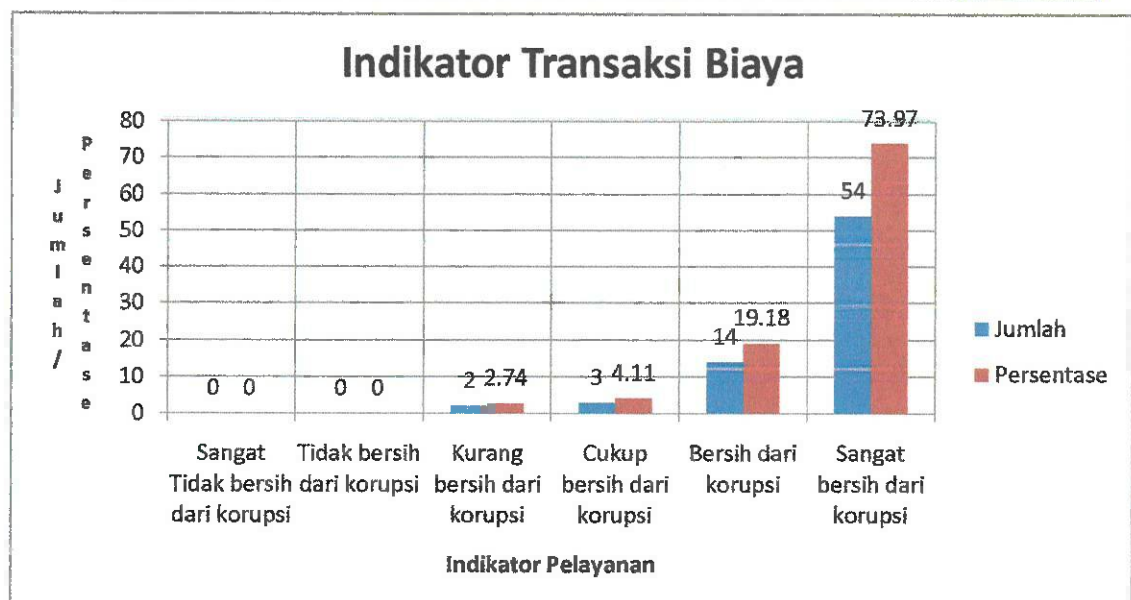
3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya menunjukkan hasil pada index 5.64.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadlan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersih dari korupsi.

Tabel 7.
Indeks Indikator Transaksi Biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1.	1.00-1.83	Sangat tidak bersih dari korupsi	0	0	0	5.64
2.	1.84-2.66	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	
3.	2.67-3.50	Kurang bersih dari korupsi	2	6	2.74	
4.	3.51-4.33	Cukup bersih dari korupsi	3	12	4.11	
5.	4.44 - 5.17	Bersih dari korupsi	14	70	19.18	
6.	5.17 – 6.00	Sangat bersih dari korupsi	54	324	73.97	
Jumlah			73	412	100%	



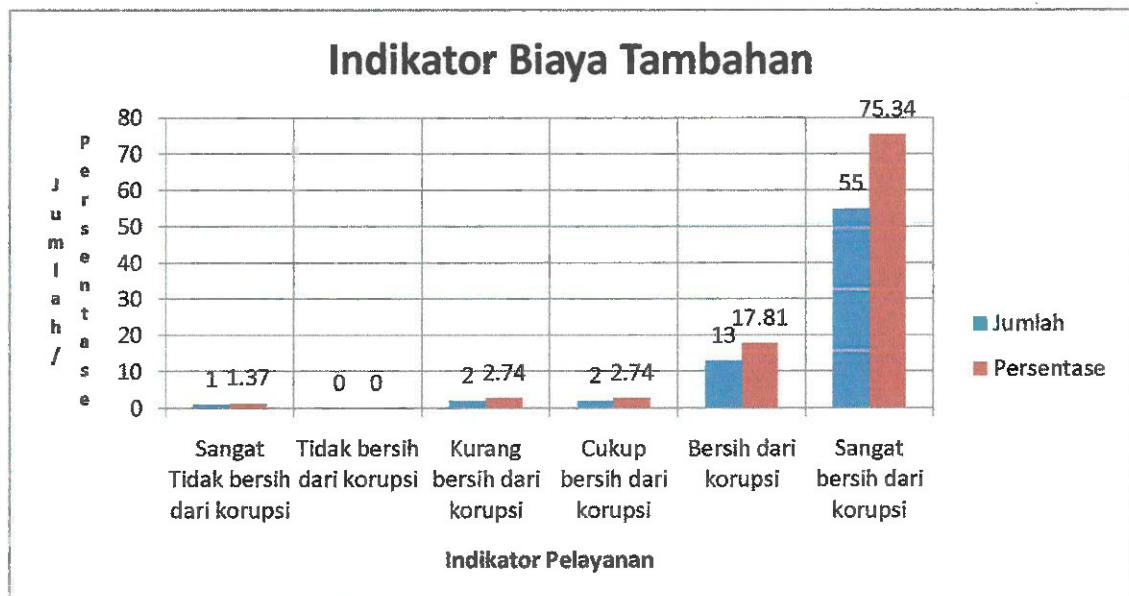
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan menunjukkan hasil pada index 5.62.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersih dari korupsi.

Tabel 8.
Indeks indikator Biaya Tambahan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1.	1.00-1.83	Sangat tidak bersih dari korupsi	1	1	1.37	5.62
2.	1.84-2.66	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	
3.	2.67-3.50	Kurang bersih dari korupsi	2	6	2.74	
4.	3.51-4.33	Cukup bersih dari korupsi	2	8	2.74	
5.	4.44 - 5.17	Bersih dari korupsi	13	65	17.81	
6.	5.17 – 6.00	Sangat bersih dari korupsi	55	330	75.34	
Jumlah			73	410	100%	



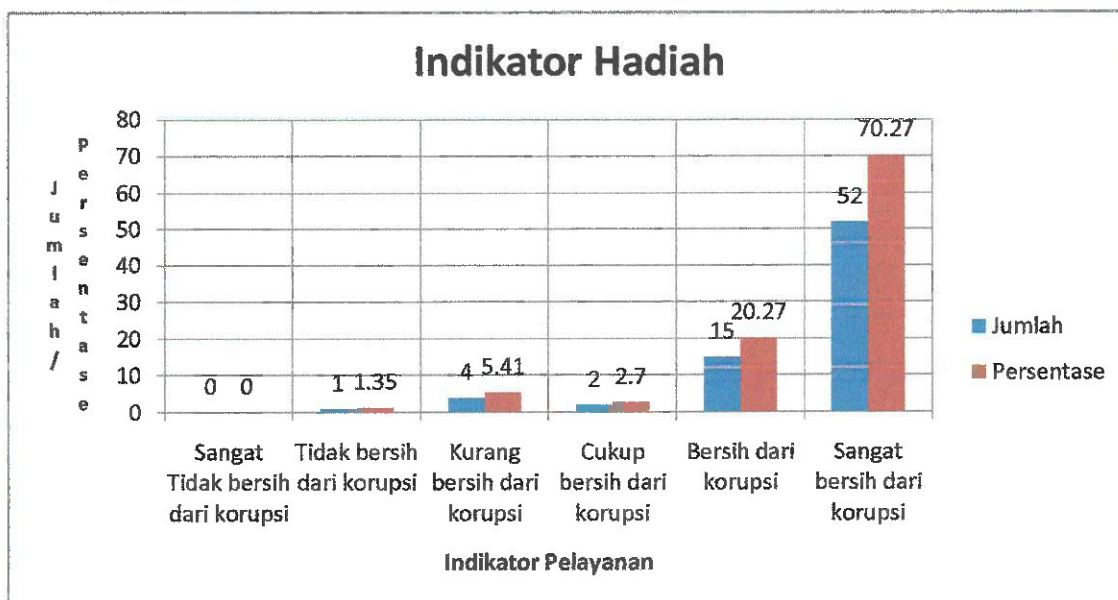
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah menunjukkan hasil pada index 5.53.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersih dari korupsi.

Tabel 9.
Indeks indikator Hadiah

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1.	1.00-1.83	Sangat tidak bersih dari korupsi	0	0	0	5.53
2.	1.84-2.66	Tidak bersih dari korupsi	1	2	1.35	
3.	2.67-3.50	Kurang bersih dari korupsi	4	12	5.41	
4.	3.51-4.33	Cukup bersih dari korupsi	2	8	2.70	
5.	4.44 - 5.17	Bersih dari korupsi	15	75	20.27	
6.	5.17 – 6.00	Sangat bersih dari korupsi	52	312	70.27	
Jumlah			74	409	100%	



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

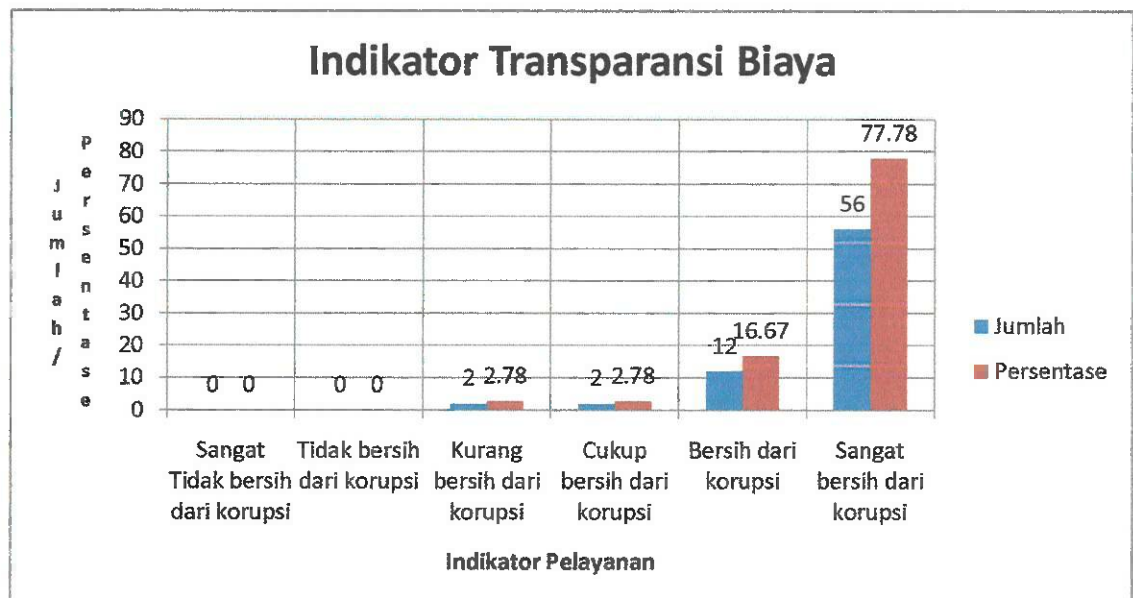
Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya menunjukkan hasil pada index 5.69.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilaan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersih dari korupsi.

Tabel 10.

Indeks Indikator Transparansi Biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1.	1.00-1.83	Sangat tidak bersih dari korupsi	0	0	0	5.69
2.	1.84-2.66	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	
3.	2.67-3.50	Kurang bersih dari korupsi	2	6	2.78	
4.	3.51-4.33	Cukup bersih dari korupsi	2	8	2.78	
5.	4.44 - 5.17	Bersih dari korupsi	12	60	16.67	
6.	5.17 – 6.00	Sangat bersih dari korupsi	56	336	77.78	
Jumlah			72	410	100%	



3.2.8. Indikator Percaloan

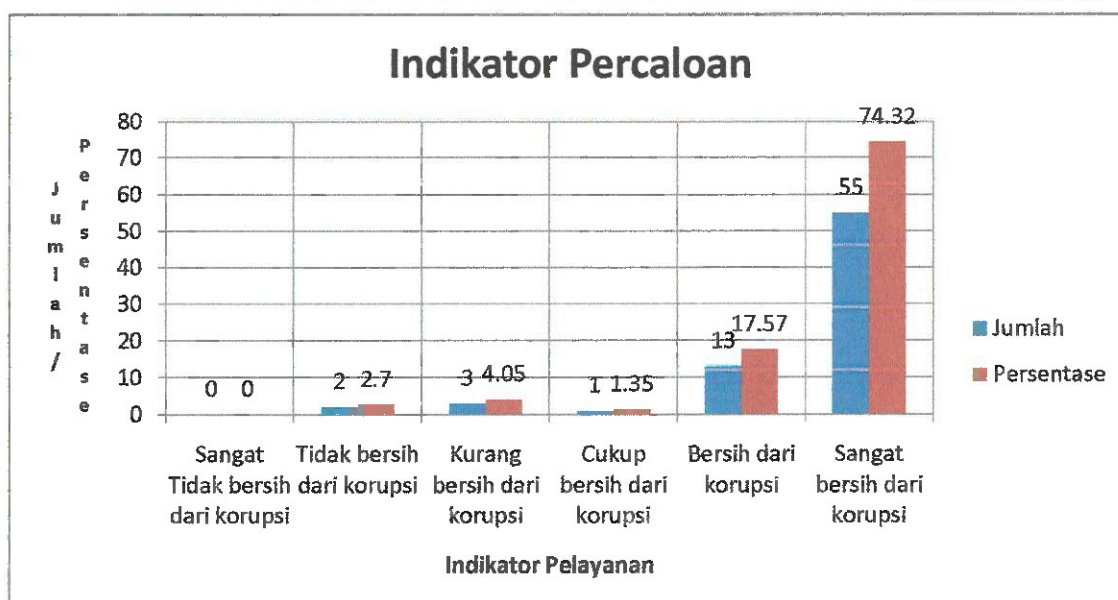
Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan menunjukkan hasil pada index 5.57.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersih dari korupsi.

Tabel 11.

Indeks Indikator Percaloan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1.	1.00-1.83	Sangat tidak bersih dari korupsi	0	0	0	5.57
2.	1.84-2.66	Tidak bersih dari korupsi	2	4	2.70	
3.	2.67-3.50	Kurang bersih dari korupsi	3	9	4.05	
4.	3.51-4.33	Cukup bersih dari korupsi	1	4	1.35	
5.	4.44 - 5.17	Bersih dari korupsi	13	65	17.57	
6.	5.17 – 6.00	Sangat bersih dari korupsi	55	330	74.32	
Jumlah			74	412	100%	



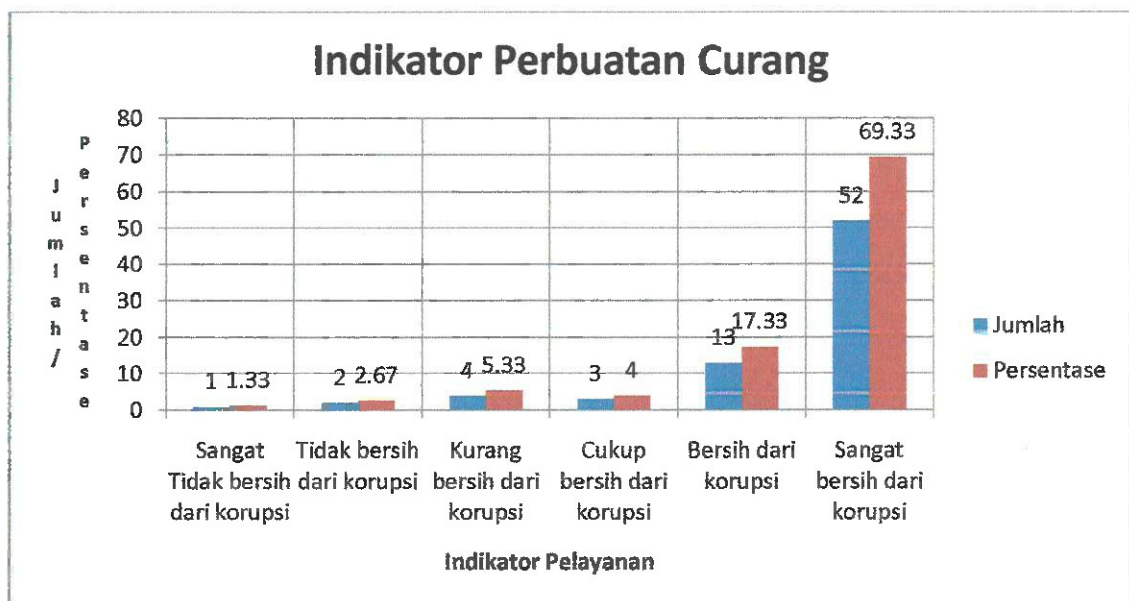
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang menunjukkan hasil pada index 5.41.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersih dari korupsi.

Tabel 12.
Indeks Indikator Perbuatan Curang

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1.	1.00-1.83	Sangat tidak bersih dari korupsi	1	1	1.33	5.41
2.	1.84-2.66	Tidak bersih dari korupsi	2	4	2.67	
3.	2.67-3.50	Kurang bersih dari korupsi	4	12	5.33	
4.	3.51-4.33	Cukup bersih dari korupsi	3	12	4.00	
5.	4.44 - 5.17	Bersih dari korupsi	13	65	17.33	
6.	5.17 – 6.00	Sangat bersih dari korupsi	52	312	69.33	
Jumlah			75	406	100%	



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

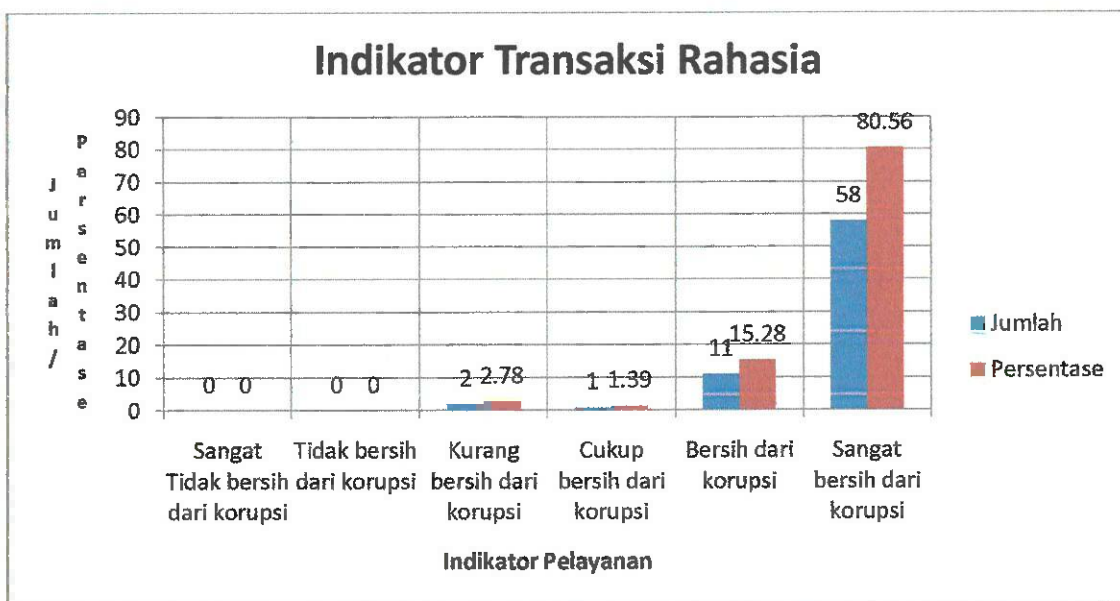
Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia menunjukkan hasil pada index 5.74.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersih dari korupsi.

Tabel 13.

Indeks Indikator Transaksi Rahasia

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f.	Prosentase (%)	
1.	1.00-1.83	Sangat tidak bersih dari korupsi	0	0	0	5.74
2.	1.84-2.66	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	
3.	2.67-3.50	Kurang bersih dari korupsi	2	6	2.78	
4.	3.51-4.33	Cukup bersih dari korupsi	1	4	1.39	
5.	4.44 - 5.17	Bersih dari korupsi	11	55	15.28	
6.	5.17 – 6.00	Sangat bersih dari korupsi	58	348	80.56	
Jumlah			72		100%	



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebesar 5.59. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14.
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

No	Unsur Pertanyaan	NRR
Q 1	Manipulasi Peraturan	5.45
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	5.63
Q 3	Menjual Pengaruh	5.62
Q 4	Transaksi Biaya	5.64
Q 5	Biaya Tambahan	5.62
Q 6	Hadiah	5.53
Q 7	Transparansi Biaya	5.69
Q 8	Percaloan	5.57
Q 9	Perbuatan Curang	5.41
Q 10	Transaksi Rahasia	5.74
JUMLAH		55.90
NILAI RATA-RATA IPK		5.59

Keterangan :

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan

NRR : Nilai Rata-rata

IPK : Indeks Persepsi Korupsi

*) : Jumlah NRR IPK Tertimbang

NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

IPK	: 5.59(SANGAT BERSIH DARI KORUPSI)
------------	---

Indeks Persepsi Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan SANGAT BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 86,11 –100,00.

Tabel 15.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSIIPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.83	16.67-30.56	1	Sangat tidak bersih dari korupsi
2	1.84 – 2.66	30.56–44.44	2	Tidak bersih dari korupsi
3	2.67 – 3.50	44.45 – 58.33	3	Kurang bersih dari korupsi
4	3.51 – 4.33	58.33 – 72.22	4	Cukup bersih dari korupsi
5	4.34 – 5.17	72.22 – 86.11	5	Bersih dari korupsi
6	5.18 – 6.00	86.11 – 100.00	6	Sangat bersih dari Korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memiliki Indeks Kepuasan Pelayanan Publik **5,59** atau masuk pada kategori **Sangat Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Manipulasi Peraturan	5.45
2. Penyalahgunaan Jabatan	5.63
3. Menjual Pengaruh	5.62
4. Transaksi Biaya	5.64
5. Biaya Tambahan	5.62
6. Hadiah	5.53
7. Transparansi Biaya	5.69
8. Percaloan	5.57
9. Perbuatan Curang	5.41
10. Transaksi Rahasia	5.74

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi Korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Bulan Maret – April Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 5.59 atau masuk pada persepsi Sangat Bersih dari Korupsi. Namun dari 10 (Sepuluh) indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Perbuatan Curang memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yaitu 5.41 dan tergolong dalam indikator kinerja Sangat bersih dari korupsi.